

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANWIL DEPDIBUD PROPINSI JAWA TENGAH
JALAN. PERUDA No. 134 SEMARANG

30 Januari 1985

Kepada Yth :

Sdr. Kepala SMP *Negeri 2*

Limbung

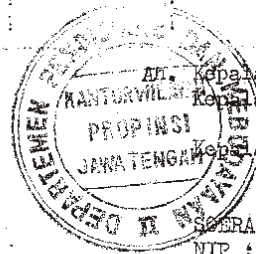
Kab. Batang

di -- *Limbung*

SURAT PENGANTAR

Nomor : 240/I.03.4/R.85

No.	Macam Surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0557/0/1984 tgl. 20 Nopember 1984 tentang Pembukaan, Panunggalan dan Penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.



At. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Dikmenum
Jub
Kepala Seksi Sarana Pendidikan
SERADI ADIPRANOTO, BA
NIP : 130 048 137



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang

Telpon Ka. Kanwil 285302, Umum: 285301 Telex: 22262 PK WIL SM.

Nomor : 034/I03.1/I.85

7 Januari 1985

Lamp :

Hal : Pembukaan, Penunggalan, Perubahan
jenis dan Penegerian sekolah tahun
ajaran 1984/1985.

Kepada

Yth : Sdr. Kakandep Dikbud Kab/~~Kec.~~

Batang

di

Batang

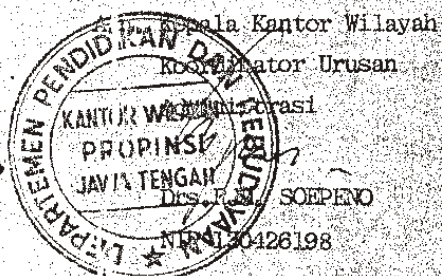
Sebagai tindak lanjut dari surat Keputusan Mendikbud R.I. perihal
Pembukaan, Penunggalan, Perubahan jenis dan Penegerian Sekolah Tahun
ajaran 1984/1985. Maka dengan ini kami menugaskan kepada Saudara un-
tuk menyelenggarakan upacara peresmian dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan :

- melaksanakan konsultasi dengan bidang yang bersangkutan di Kanwil
Depdikbud Prop Jateng.
- harap Saudara melapor kepada Bapak Bupati KDH dan mohon petunjuk.
- mengundang pejabat daerah yang relevan.
- mengundang orang tua murid.
- mengundang jajaran Depdikbud setempat.
- upacara diadakan tidak perlu bermewah-mewah yang menggambarkan
pemborosan, cukup sederhana saja tapi khikmad.
- mengundang unsur Kanwil Depdikbud Prop Jateng.

Demikian agar menjadikan perhatian Saudara dan melaporkan pelaksa-
naannya.

TEMBUSAN

- ✓ 1. Sdr. Kepala *vmp. Neg. 2*
di *himpeng... Batang*
2. Arsip.



SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0557/0/1984

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 40/M Tahun 1980;
- c. Nomor 45/M Tahun 1983;
- d. Nomor 15 Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
- b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
- c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
- d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-347/I/MENFAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;
- Menetapkan :
Pertama :
- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.884 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOFRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

.....

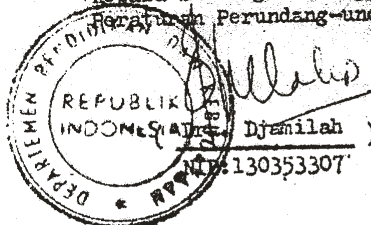
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan,



Lampiran I : Surat Keputusan Mendikbud No.0557/0/1984
Tanggal 20 Nopember 1984.

SMP KAB. PEKALONGAN

UMUR	PROVINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/ INDUK	LOKASI	
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya
3.	Java Tengah	44.			
		45.			
		46. SMP Negeri 2 Lampung	--	Lampung	Kab. Batang
		47. SMP Negeri 2 Tulis	--	Tulis	Kab. Batang